

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
RINGKASAN.....	ix
DAFTAR ISI	Ivii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. KEGUNAAN PENELITIAN	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis	10
E. KERANGKA KONSEPTUAL	10
F. KERANGKA TEORI	24
G. KERANGKA PEMIKIRAN	45
H. METODE PENELITIAN	46
I. ORISINALITAS PENELITIAN	57
J. SISTEMATIKA PENULISAN	59
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	61
A. PENGERTIAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>)	61
B. UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>)	65
C. KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL	84
D. PROSEDUR HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL	102
E. BARANG BUKTI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>)	109
F. KEBIJAKAN HUKUM PEMUSNAHAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL	123
BAB III KEBIJAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>) BELUM MENSEJAHTERAKAN NELAYAN KECIL	126
A. KEBIJAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEMUSNAHAN KAPAL PENANGKAPAN <i>ILLEGAL FISHING</i>	126

1. <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU) Fishing</i> Berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	126
2. Kebijakan Pokok KKP Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	129
B. STRATEGI INDONESIA UNTUK MENJAGA KEDAULATAN DALAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	135
1. Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> dalam Pasal 69 Ayat (4) Pada Tahapan Pra-Penyidikan dan Pasal 76A Pada Tahapan Penyidikan	135
2. Kebijakan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan <i>Illegal Fishing</i>	138
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Peraturan Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 11/Per- DJPSDKP/2014	145
C. PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN PASAL 76A, PASAL 76B DAN PASAL 76C	150
D. KESEJAHTERAAN NELAYAN KECIL	177
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN KEBIJAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>)	185
A. KELEMAHAN KEBIJAKAN SANKSI YANG DIBERIKAN BAGI PELAKU ILEGAL FISHING	185
B. KELEMAHAN KEBIJAKAN SANKSI HUKUM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI ILEGAL FISHING	189
C. PERMASALAHAN KETIDAKADILAN ILEGAL FISHING BAGI NELAYAN KECIL	192
D. KEBIJAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI ILEGAL FISHING	195
BAB V REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>) BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN NELAYAN KECIL	214
A. KEBIJAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>) BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN NELAYAN KECIL DI BERBAGAI NEGARA (<i>INTERNATIONAL WISDOM</i>)	214
1. Thailand	215
2. Philipina	215

3. Malaysia	216
Tabel Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Kapal Penangkapan Illegal Fishing Di Negara Lain	216
B. KEBIJAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>) BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN NELAYAN KECIL DI INDONESIA (<i>NATIONAL WISDOM</i>)	218
C. REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>) BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN NELAYAN KECIL	226
BAB VI PENUTUP	230
A. KESIMPULAN	230
B. SARAN	232
C. IMPLIKASI KAJIAN DISERTASI	233
DAFTAR PUSTAKA	235
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	